



**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 100.3.3.2/471/2025**

TENTANG

**DAFTAR DATA STATISTIK SEKTORAL
KABUPATEN MURUNG RAYA**

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia;
- b. bahwa hasil pengumpulan data yang dilakukan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Daftar Data Statistik Kabupaten Murung Raya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Data Statistik Sektoral Kabupaten Murung Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 12);
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);

14. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorial Oleh Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1270);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 38) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2024 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 28);
16. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 44 Tahun 2025 Tentang Satu Data Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2025 Nomor 261);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG DAFTAR DATA STATISTIK SEKTORAL KABUPATEN MURUNG RAYA.**

KESATU : Data Statistik Sektorial Kabupaten Murung Raya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Data statistik sektorial merupakan data statistik spesifik yang dikumpulkan dari Organisasi Perangkat Daerah yang digunakan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah, evaluasi pembangunan daerah dan dasar penganggaran bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya.

KETIGA : Data statistik prioritas merupakan data terpilih dan strategis yang dikumpulkan dari Organisasi Perangkat Daerah sesuai bidang tugasnya yang digunakan untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, serta pengendalian pembangunan nasional dan daerah dengan rincian data sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 23 Desember 2025

BUPATI MURUNG RAYA,



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Murung Raya,
RHONI KLAWA TUMON, S.H., M.H.

ttd

HERIYUS



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

SALINAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 100.3.3.2/471/2025
TENTANG
DAFTAR DATA STATISTIK SEKTORAL
KABUPATEN MURUNG RAYA

DAFTAR DATA STATISTIK SEKTORAL KABUPATEN MURUNG RAYA

NO	NAMA DATA	JENIS DATA	PRODUSEN DATA	FREKUENSI PEMUTAKHIRAN	KLASI FIKASI
1	2	3	4	5	6
1.	Data Kasus Kekerasan Pada Anak Menurut Bentuk Kekerasan Tahun 2024	Publik	DP3KADALDUKKB	Tahunan	
2.	Data Jumlah Anak Korban Kekerasan yang di Tangani dan Didampingi	Publik	DP3KADALDUKKB	Tahunan	
3.	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	Publik	DP3KADALDUKKB	Tahunan	
4.	Data Kekerasan Terhadap Perempuan	Publik	DP3KADALDUKKB	Tahunan	
5.	Angka Total Kelahiran	Publik	DP3KADALDUKKB	Tahunan	
6.	Jumlah Pemakaian Kontrasepsi Modern	Publik	DP3KADALDUKKB	Tahunan	
7.	Persentase Kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi	Publik	DP3KADALDUKKB	Tahunan	
8.	TFR dan ASFR Tahun 2024	Publik	DP3KADALDUKKB	Tahunan	
9.	Jumlah Peserta PUS, KB, Bukan peserta KB Tahun 2024	Publik	DP3KADALDUKKB	Tahunan	
10.	Jumlah Pasangan Usia Subur Tahun 2024	Publik	DP3KADALDUKKB	Tahunan	
11.	Rasio Angka Kelahiran Total	Publik	DP3KADALDUKKB	Tahunan	
12.	Jumlah Peserta KB Aktif Modern Tahun 2024	Publik	DP3KADALDUKKB	Tahunan	
13.	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (ASFR)	Publik	DP3KADALDUKKB	Tahunan	
14.	Peserta KB Baru	Publik	DP3KADALDUKKB	Tahunan	
15.	Peserta KB Baru MKJP	Publik	DP3KADALDUKKB	Tahunan	
16.	Peserta KB Baru Pasca Persalinan	Publik	DP3KADALDUKKB	Tahunan	
17.	MCPR	Publik	DP3KADALDUKKB	Tahunan	
18.	Indeks Pembangunan Keluarga (Bangga)	Publik	DP3KADALDUKKB	Tahunan	
19.	Indeks Lansia Berdaya	Publik	DP3KADALDUKKB	Tahunan	
20.	Indeks Pengasuhan Remaja	Publik	DP3KADALDUKKB	Tahunan	
21.	Kampung Mandiri	Publik	DP3KADALDUKKB	Tahunan	
22.	IPBK	Publik	DP3KADALDUKKB	Tahunan	
23.	KTD	Publik	DP3KADALDUKKB	Tahunan	
24.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Publik	DP3KADALDUKKB	Tahunan	
25.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Publik	DP3KADALDUKKB	Tahunan	
26.	Data Destinasi Wisata	Publik	DKOP Pariwisata	Tahunan	
27.	Data Dukung Bidang Kepemudaan	Publik	DKOP Pariwisata	Tahunan	

28.	Data Objek Wisata	Publik	DKOP Pariwisata	Tahunan	
29.	Data Olah Raga	Publik	DKOP Pariwisata	Tahunan	
30.	Data Organisasi Olahraga	Publik	DKOP Pariwisata	Tahunan	
31.	Data Pensiunan	Publik	DKOP Pariwisata	Triwulan	
32.	Data ASN (PNS dan PPPK)	Publik	BKPSDM	Semester	
33.	Data ASN Menurut Pendidikan	Publik	BKPSDM	Semester	
34.	Daftar Nama Calon Peserta PKN	Publik	BKPSDM	Tahunan	
35.	Daftar Nama Calon Peserta PKA	Publik	BKPSDM	Tahunan	
36.	Daftar Nama Calon Peserta PKP	Publik	BKPSDM	Tahunan	
37.	Data Penerima Satyalencana (X,XX,XXX)	Publik	BKPSDM	Tahunan	
38.	Rekapitulasi Kenaikan Pangkat PNS Kabupaten Murung Raya	Publik	BKPSDM	Tahunan	
39.	Daftar Mutasi PNS	Publik	BKPSDM	Tahunan	
40.	Daftar Wajib Pajak Walet	Publik	BAPENDA	Semester	
41.	Daftar Wajib PBJT Jasa Parkir	Publik	BAPENDA	Semester	
42.	Daftar Wajib Pajak Hiburan	Publik	BAPENDA	Tahunan	
43.	Daftar Wajib Pajak Air Tanah	Publik	BAPENDA	Tahunan	
44.	Daftar Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Publik	BAPENDA	Tahunan	
45.	Laporan Penerimaan Pajak / PAD yang sudah teraudit	Publik	BAPENDA	Tahunan	
46.	NJOP	Publik	BAPENDA	Tahunan	
47.	Data Objek Pajak	Publik	BAPENDA	Tahunan	
48.	Pengaduan dan Survey Kepuasan Masyarakat	Publik	BAPENDA	Semester	
49.	Daftar Wajib Pajak Reklame	Publik	BAPENDA	Semester	
50.	Layanan Publik Secara Online	Publik	BAPENDA	Tahunan	
51.	Jumlah Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	Publik	BAPENDA	Tahunan	
52.	Penataan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 Ha	Publik	DISPERKIMTAN	Tahunan	
53.	Daftar Rumah yang Sudah di Rehab	Publik	DISPERKIMTAN	Tahunan	
54.	Jumlah Rumah Layak Huni	Publik	DISPERKIMTAN	Tahunan	
55.	Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Publik	DISPERKIMTAN	Tahunan	
56.	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan yang di lakukan melalui Mediasi	Publik	DISPERKIMTAN	Semester	
57.	Pemanfaatan Tanah yang sesuai Peruntukan Tanahnya diatas Izin Lokasi yang di terbitkan	Publik	DISPERKIMTAN	Semester	
58.	Jumlah Data Drainase	Publik	DISPERKIMTAN	Tahunan	
59.	Jumlah Sekolah Dasar (SD) dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Publik	DISDIKBUD	Tahunan	
60.	Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Publik	DISDIKBUD	Tahunan	
61.	Jumlah Murid Sekolah Dasar (SD) dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Publik	DISDIKBUD	Tahunan	
62.	Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Publik	DISDIKBUD	Tahunan	

63.	Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Publik	DISDIKBUD	Tahunan	
64.	Jumlah Murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Publik	DISDIKBUD	Tahunan	
65.	Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Publik	DISDIKBUD	Tahunan	
66.	Jumlah Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Publik	DISDIKBUD	Tahunan	
67.	Jumlah Murid Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Publik	DISDIKBUD	Tahunan	
68.	Luas Panen Pertanian Tanaman Hortikultura Kab. Murung Raya	Publik	DISTANIK	Tahunan	
69.	Rekap Produksi Pertanian Tanaman Hortikultura Kab. Murung Raya	Publik	DISTANIK	Tahunan	
70.	Rekap Produksi Pertanian Tanaman Pangan Kab. Murung Raya	Publik	DISTANIK	Tahunan	
71.	Luas Panen Pertanian Tanaman Pangan Kab. Murung Raya	Publik	DISTANIK	Tahunan	
72.	Rekap Produktivitas Pertanian Tanaman Holtikultura Kab. Murung Raya	Publik	DISTANIK	Tahunan	
73.	Data Tingkat Konsumsi Ikan Kg/Kapita/Tahun	Publik	DISTANIK	Tahunan	
74.	Izin Usaha Perikanan	Publik	DISTANIK	Tahunan	
75.	Jumlah Pasar Tradisional Di Kab. Murung Raya	Publik	DISTANIK	Tahunan	
76.	Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) Tangkap	Publik	DISTANIK	Tahunan	
77.	Jumlah Kapal < 5GT	Publik	DISTANIK	Tahunan	
78.	Luas Potensi Lahan Budidaya Ikan (Kolam dan Keramba)	Publik	DISTANIK	Tahunan	
79.	Rekap Produksi Perikanan Tangkap Kab. Murung Raya	Publik	DISTANIK	Tahunan	
80.	Rekap Produksi Perikanan Budidaya Kab. Murung Raya	Publik	DISTANIK	Tahunan	
81.	Rekap Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	Publik	DISTANIK	Tahunan	
82.	Jumlah Produksi Daging berdasarkan Jenis Ternak	Publik	DISTANIK	Tahunan	
83.	Jumlah Ternak Berdasarkan Jenis Ternak	Publik	DISTANIK	Tahunan	
84.	Jumlah Produksi Telur Berdasarkan Jenis Ternak	Publik	DISTANIK	Tahunan	
85.	Rekap Produksi Perikanan Kab. Murung Raya	Publik	DISTANIK	Tahunan	
86.	Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Perikanan	Publik	DISTANIK	Tahunan	

87.	Rekap Produksi Perkebunan (Ton) Kab. Murung Raya	Publik	DISTANIK	Tahunan	
88.	Data Perkebunan Rakyat	Publik	DISTANIK	Tahunan	
89.	Rekap Produksi Perikanan Kab. Murung Raya	Publik	DISTANIK	Tahunan	
90.	Rekap Produksi Peternakan Kabupaten Murung Raya	Publik	DISTANIK	Tahunan	
91.	Daftar Kelompok Tani di Kab. Murung Raya	Publik	DISTANIK	Tahunan	
92.	Data Balai Penyuluh Pertanian Kab. Murung Raya	Publik	DISTANIK	Tahunan	
93.	Persentase Tempat Pengelolaan Pangan Yang Memenuhi Syarat Kesehatan Menurut Kecamatan	Publik	DINKES	Tahunan	
94.	Persentase Tempat dan Fasilitas Umum (TFU) Yang dilakukan Pengawasan Sesuai Standart	Publik	DINKES	Tahunan	
95.	Persentase Sarana Air Minum Yang diawasi / diperiksa Kualitas Air Mkinum nya sesuai Standar Kab. Murung Raya	Publik	DINKES	Tahunan	
96.	Sanitasi Total berbasis Masyarakat dan Rumah Sehat	Publik	DINKES	Tahunan	
97.	Jumlah Kepala Keluarga dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi Yang Aman (Jamban Srhat)	Publik	DINKES	Tahunan	
98.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Publik	DINKES	Tahunan	
99.	Cakupan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dengan Metode Iva dan Kanker Payudara Dengan Pemeriksaan Klinis (Sanadis)	Publik	DINKES	Tahunan	
100.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Publik	DINKES	Tahunan	
101.	Pelayanan Kesehatan Diabetes Melitus (DM)	Publik	DINKES	Tahunan	
102.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Menurut Jenis Kelamin	Publik	DINKES	Tahunan	
103.	Penderita Kronis Filariasis Menurut Jenis Kelamin	Publik	DINKES	Tahunan	
104.	Kesakitan dan Kematian Akibat Malaria Menurut Jenis Kelamin	Publik	DINKES	Tahunan	
105.	Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) Menurut Jenis Kelamin	Publik	DINKES	Tahunan	
106.	Kejadian Luar Biasa (KLB) di Desa/Kelurahan yang di tangani < 24 Jam	Publik	DINKES	Tahunan	
107.	Penderita Kusta Selesai Berobat (Release From Treatment/RFT) Menurut Tipe	Publik	DINKES	Tahunan	
108.	Jumlah Kasus Terdaftar dan Angka Prevalensi Penyakit Kusta Menurut Tipe/Jenis, Usia, Kesehatan	Publik	DINKES	Tahunan	

109.	Kasus Baru Kusta Cacat Tingkat 0, Cacat Tingkat 2, Penderita Kusta Anak < 15 Tahun	Publik	DINKES	Tahunan	
110.	Kasus Baru Kusta Menurut Jenis Kelamin	Publik	DINKES	Tahunan	
111.	Jumlah Bayi Yang Lahir dari Ibu Reaktif HBsAg dan Mendapatkan HBIG Kab. Murung Raya	Publik	DINKES	Tahunan	
112.	Deteksi Dini Hepatitis B Pada Ibu Hamil	Publik	DINKES	Tahunan	
113.	Kasus Diare Yang dilayani Menurut Jenis Kelamin	Publik	DINKES	Tahunan	
114.	Presentase ODHIV Baru Mendapatkan Pengobatan	Publik	DINKES	Tahunan	
115.	Jumlah Kasus HIV menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Kab. Murung Raya	Publik	DINKES	Tahunan	
116.	Penemuan Kasus Pnemonia Balita Menurut Jenis Kelamin	Publik	DINKES	Tahunan	
117.	Angka Kesembuhan dan Pengobatan Lengkap Serta Keberhasilan Pengobatan Tuberkolosis Menurut Jenis Kelamin Menurut Jenis Kelamin	Publik	DINKES	Tahunan	
118.	Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Menurut jenis Kelamin	Publik	DINKES	Tahunan	
119.	Status Gizi Balita Berdasarkan Indeks BB/U, TB/U, dan BB/TB Menurut Kecamatan dan Puskesmas	Publik	DINKES	Tahunan	
120.	Jumlah Balita Di timbang Menurut jenis Kelamin, Kecamatan dan Puskesmas	Publik	DINKES	Tahunan	
121.	Cakupan Pemberian Vitamin A Pada Bayi dan Anak Balita	Publik	DINKES	Tahunan	
122.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Menurut Jenis Kelamin	Publik	DINKES	Tahunan	
123.	Bayi baru Lahir Mendapat IMD* dan Pemberian ASI Eksklusif Pada Bayi < 6 Bulan	Publik	DINKES	Tahunan	
124.	Cakupan Kunjungan Neonatal, Menurut Jenis Kelamin	Publik	DINKES	Tahunan	
125.	Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan Prematur Menurut Jenis Kelamin	Publik	DINKES	Tahunan	
126.	Jumlah Kematian Neonatal dan Post Neonatal menurut Penyebab Utama	Publik	DINKES	Tahunan	
127.	Jumlah Kematian Anak Balita Menurut Penyebab Utama	Publik	DINKES	Tahunan	
128.	Jumlah Kematian Neonatal, Post Neonatal, Bayi dan Balita Menurut Jenis Kelamin	Publik	DINKES	Tahunan	
129.	Jumlah dan Persentase Komplikasi Neonatal Menurut Jenis Kelamin	Publik	DINKES	Tahunan	
130.	Jumlah dan Persentase Komplikasi Kebidanan Menurut Jenis Kelamin	Publik	DINKES	Tahunan	

131.	Cakupan dan Proporsi Peserta KB Pasca Persalinan Menurut Jenis Kontrasepsi	Publik	DINKES	Tahunan	
132.	Pasangan Usia Subur dengan status 4 terlalu (4T) dan ALKI yang menjadi Peserta KB Aktif	Publik	DINKES	Tahunan	
133.	Peserta KB Aktif Metode Modern Menurut Jenis Kontrasepsi dan peserta KB Aktif mengalami Efek Samping, Komplikasi Kegagalan dan Dropout	Publik	DINKES	Tahunan	
134.	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan dan Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)	Publik	DINKES	Tahunan	
135.	Persentase Cakupan Imunisasi Td Pada Wanita Usia Subur (Hamil dan Tidak Hamil)	Publik	DINKES	Tahunan	
136.	Persentase Cakupan Imunisasi Td Pada Wanita Usia Subur yang Tidak Hamil	Publik	DINKES	Tahunan	
137.	Cakupan Imunisasi Td pada Ibu Hamil	Publik	DINKES	Tahunan	
138.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Ibu Hamil, Ibu Bersalin dan Ibu Nifas	Publik	DINKES	Tahunan	
139.	Jumlah Kematian Ibu Menurut Penyebab	Publik	DINKES	Tahunan	
140.	Jumlah Kematian Ibu	Publik	DINKES	Tahunan	
141.	Jumlah Kelahiran Menurut Jenis Kelamin	Publik	DINKES	Tahunan	
142.	Jumlah Tenaga Penunjang/Pendukung Kesehatan di Fasilitas Kesehatan	Publik	DINKES	Tahunan	
143.	Jumlah Tenaga Teknik Biomedika, Keterampilan Fisik, dan Keteknisian Medik di Fasilitas Kesehatan	Publik	DINKES	Tahunan	
144.	Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan, dan Gizi di Fasilitas Kesehatan	Publik	DINKES	Tahunan	
145.	Jumlah Tenaga Keperawatan dan Tenaga Kebidanan di Fasilitas Kesehatan	Publik	DINKES	Tahunan	
146.	Jumlah Tenaga Medis di Fasilitas Kesehatan	Publik	DINKES	Tahunan	
147.	Jumlah Posyandu dan Posbindu PTM	Publik	DINKES	Tahunan	
148.	Ketersediaan Vaksin IDL (Imunisasi Dasar Lengkap)	Publik	DINKES	Tahunan	
149.	Ketersediaan Obat Esensial	Publik	DINKES	Tahunan	
150.	Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat Esensial	Publik	DINKES	Tahunan	
151.	Indikator Kinerja Pelayanan di Rumah Sakit	Publik	DINKES	Tahunan	
152.	Angka Kematian Pasien di Rumah Sakit	Publik	DINKES	Tahunan	

153.	Persentase Rumah Sakit dengan Kemampuan Pelayanan Gawat Darurat (Gadar) Level I	Publik	DINKES	Tahunan	
154.	Jumlah Kunjungan Pasien Baru Rawat Jalan, Rawat Inap dan Kunjungan Gangguan Jiwa di Sarana Pelayanan Kesehatan	Publik	DINKES	Tahunan	
155.	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Menurut Kepemilikan	Publik	DINKES	Tahunan	
156.	Penduduk berumur 115 Tahun ke Atas yang Melek Huruf dan Ijazah Tertinggi yang di peroleh Menurut Jenis Kelamin	Publik	DINKES	Tahunan	
157.	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur	Publik	DINKES	Tahunan	
158.	Luas Wilayah, Jumlah Desa/Kelurahan, Jumlah Penduduk, Jumlah Rumah Tangga dan Kepadatan Penduduk	Publik	DINKES	Tahunan	
159.	Jumlah Kepala Keluarga dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi Yang Aman (Jamban Sehat)	Publik	DINKES	Tahunan	
160.	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Menurut Kepemilikan	Publik	DINKES	Tahunan	
161.	Data Angkutan Orang	Publik	DISHUB	Tahunan	
162.	Daftar Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang di Uji KIR di UPUBKB	Publik	DISHUB	Tahunan	
163.	Data Perizinan Berusaha Sektor Perhubungan	Publik	DISHUB	Tahunan	
164.	Data Angkutan Sungai dan Danau Yang Memiliki Perizinan	Publik	DISHUB	Tahunan	
165.	Pelaksanaan Ujian Berkala Kendaraan Bermotor	Publik	DISHUB	Tahunan	
166.	Bongkar Muat Barang dan Penumpang	Publik	DISHUB	Tahunan	
167.	Lalu Lintas Angkutan Udara Menurut Asal/Tujuan Bandara	Publik	DISHUB	Tahunan	
168.	Lalu Lintas Barang dan Penumpang dengan Angkutan Sungai/Danau	Publik	DISHUB	Tahunan	
169.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Publik	DISPERPURSIP	Tahunan	
170.	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Publik	DISPERPURSIP	Tahunan	
171.	Survey Kepuasan Masyarakat	Publik	DISPERPURSIP	Tahunan	
172.	Indeks Hasil Pengawasan Eksternal Kearsipan	Publik	DISPERPURSIP	Tahunan	
173.	Jumlah Arsip Aktif yang telah di buat Daftar Arsip	Publik	DISPERPURSIP	Semesteran	
174.	Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Pada Penduduk Usia 0 s/d 18 Tahun	Publik	DISDUKCAPIL	Semesteran	
175.	Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak	Publik	DISDUKCAPIL	Semesteran	

176.	Persentase Cakupan Akte Penceraian Pada Semua Individu	Publik	DISDUKCAPIL	Tahunan	
177.	Jumlah Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data	Publik	DISDUKCAPIL	Semesteran	
178.	Persentase Perekaman Percetakan KTP	Publik	DISDUKCAPIL	Semesteran	
179.	Persentasi Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	Publik	DISDUKCAPIL	Semesteran	
180.	Persentase Akte Perkawinan dan Kematian	Publik	DISDUKCAPIL	Semesteran	
181.	Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA)	Publik	DISHANPANG	Tahunan	
182.	PPH Konsumsi	Publik	DISHANPANG	Tahunan	
183.	Panel Harga Pangan	Publik	DISHANPANG	Tahunan	
184.	Pangan Segar Asal Tumbuhan	Publik	DISHANPANG	Tahunan	
185.	Rasio Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPB)	Publik	DISHANPANG	Tahunan	
186.	Skor Pola Pangan Harapan (Ketersediaan)	Publik	DISHANPANG	Tahunan	
187.	Bantuan Pangan Non Tunai	Publik	DINSOS	Triwulan	
188.	Program Keluarga Harapan	Publik	DINSOS	Triwulan	
189.	Kartu BLT Hebat	Publik	DINSOS	Triwulan	
190.	Santunan Kematian	Publik	DINSOS	Tahunan	
191.	Bantuan Orang dengan Gangguan Jiwa	Publik	DINSOS	Tahunan	
192.	Data Stanting	Publik	DINSOS	Tahunan	
193.	Rekapitulasi Penanganan Tindak Lanjut	Publik	DPMPTSP	Triwulan	
194.	Rekapitulasi Kegiatan Layanan Pengaduan dan Informasi	Publik	DPMPTSP	Triwulan	
195.	Survey Kepuasan Masyarakat	Publik	DPMPTSP	Triwulan	
196.	Laporan Forum Konsultasi Publik	Publik	DPMPTSP	Tahunan	
197.	Data Realisasi Investasi PMA dan PMDN serta Sektor di dalamnya	Publik	DPMPTSP	Triwulan	
198.	Rekapitulasi Laporan Perizinan dan Non Perizinan yang ada DI DPMTSP	Publik	DPMPTSP	Triwulan	
199.	Perkembangan Harga Harian Kebutuhan Pokok	Publik	DISPERINDAGKOP	Mingguan	
200.	Data Kelembagaan Koperasi	Publik	DISPERINDAGKOP	Tahunan	
201.	Data Sarana dan Prasarana Pasar	Publik	DISPERINDAGKOP	Tahunan	
202.	Data IKM, data baru ada	Publik	DISPERINDAGKOP	Tahunan	
203.	Persentase Koperasi Yang Berkwalitas	Publik	DISPERINDAGKOP	Tahunan	
204.	Persentase Peningkatan Nilai Penjualan (Omst) LKM	Publik	DISPERINDAGKOP	Tahunan	
205.	Persentase UKM yang berkembang UMKM	Publik	DISPERINDAGKOP	Tahunan	
206.	Profil Pasar Kalimantan Tengah Kab. Murung Raya	Publik	DISPERINDAGKOP	Tahunan	
207.	Jumlah Usulan Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang di tangani	Publik	DLH	Tahunan	

208.	Indeks Kualitas Air	Publik	DLH	Tahunan	
209.	Indeks Kualitas Udara	Publik	DLH	Tahunan	
210.	Indekas Kualitas Lahan	Publik	DLH	Tahunan	
211.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Publik	DLH	Tahunan	
212.	Jumlah Seluruh Total Volume Timbunan Sampah	Publik	DLH	Tahunan	
213.	Jumlah Sampah Yang di tangani	Publik	DLH	Tahunan	
214.	Jumlah Pencari Kerja	Publik	DISTRANSNAKER	Tahunan	
215.	Jumlah Data Perusahaan dan Internal	Publik	DISTRANSNAKER	Tahunan	
216.	Data Wilayah Transmigrasi	Publik	DISTRANSNAKER	Tahunan	
217.	Data Bangunan yang Dimiliki	Publik	DISTRANSNAKER	Tahunan	
218.	Jumlah Tenaga Kerja Bersertifikat	Publik	DISTRANSNAKER	Tahunan	
219.	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja	Publik	DISTRANSNAKER	Tahunan	
220.	Jumlah Kapasitas Latih Lembaga Pelatihan Kerja	Publik	DISTRANSNAKER	Tahunan	
221.	Persentase Lembaga Pendidikan	Publik	BKAD	Tahunan	
222.	Persentase Silpa Terhadap APBD	Publik	BKAD	Tahunan	
223.	Persentase Belanja Kesehatan	Publik	BKAD	Tahunan	
224.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Publik	BKAD	Tahunan	
225.	Nilai APBD	Publik	BKAD	Tahunan	
226.	Jumlah ASN yang mengikuti Pembinaan Keuangan, Pengelolaan BMD, Akuntansi	Publik	BKAD	Tahunan	
227.	Administrasi Pemerintahan Desa	Publik	BPMD	Tahunan	
228.	Tata Kelola Pemerintahan Desa	Publik	BPMD	Tahunan	
229.	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Desa	Publik	BPMD	Tahunan	
230.	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Desa Melalui BumDes	Publik	BPMD	Tahunan	
231.	Bong Des	Publik	BPMD	Tahunan	
232.	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Publik	BPMD	Tahunan	
233.	Kelembagaan Adat dan Masyarakat Hukum Adat Pembangunan	Publik	BPMD	Tahunan	
234.	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Publik	SETDA	Tahunan	
235.	Indeks Pelayanan Publik	Publik	SETDA ORGANISASI	Tahunan	
236.	Persentase Kematangan OPD	Publik	SETDA ORGANISASI	2 Tahun Sekali	
237.	Persentase Kelembagaan OPD	Publik	SETDA ORGANISASI	2 Tahun Sekali	
238.	Jumlah Rumah Ibadah	Publik	SETDA KESRA	Tahunan	
239.	Jumlah penghulu dan pendeta	Publik	SETDA KESRA	Tahunan	
240.	Jumlah Penerima Bantuan Skripsi Wisuda	Publik	SETDA KESRA	Tahunan	
241.	Jumlah Penerima Beasiswa Kartu Mura Hebat (S1) Reguler dan Non Reguler	Publik	SETDA KESRA	Tahunan	

242.	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan yang dikelola Setda	Publik	SETDA UMUM	Tahunan	
243.	Jumlah Rumah Dinas yg dikelola oleh Setda	Publik	SETDA UMUM	Tahunan	
244.	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan yang dikelola Setda	Publik	SETDA UMUM	Tahunan	
245.	Jumlah Kompilasi Data Pelanggaran Peraturan Daerah (PERDA)	Publik	SETDA UMUM	Tahunan	

BUPATI MURUNG RAYA,



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Murung Raya,

RHONI KLAWA TUMON, S.H., M.H.



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

ttd

HERIYUS

SALINAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 100.3.3.2/471/2025
TENTANG
DAFTAR DATA STATISTIK SEKTORAL
KABUPATEN MURUNG RAYA

DAFTAR DATA STATISTIK PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA

NO	NAMA DATA	JENIS DATA	PRODUSEN DATA	FREKUENSI PEMUTAKHIRAN	KLASI FIKASI
1	2	3	4	5	6
1.	Indeks Risiko Bencana	Publik	BPBD	Tahunan	
2.	Indeks Ketahanan Bencana	Publik	BPBD	Tahunan	
3.	Jumlah korban meninggal,hilang, dan terkena dampak bencana	Publik	BPBD	Semester	
4.	Luasnya cakupan wilayah yang di layani dan kurangnya personel terlatih dan terampil, terbatasnya sarana dan prasaran pendukung dalam penanganan korban terdampak bencana alam dan sosial	Publik	BPBD	Tahunan	
5.	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	Publik	DISDIKBUD	Tahunan	
6.	Jumlah anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	Publik	DISDIKBUD	Tahunan	
7.	Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Publik	DISDIKBUD	Tahunan	
8.	Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Publik	DISDIKBUD	Tahunan	
9.	Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Publik	DISDIKBUD	Tahunan	
10.	Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Publik	DISDIKBUD	Tahunan	
11.	Rata-rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Publik	DISDIKBUD	Tahunan	
12.	Proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	Publik	DISDIKBUD	Tahunan	
13.	Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi	Publik	DISDIKBUD	Tahunan	
14.	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SD	Publik	DISDIKBUD	Tahunan	
15.	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SMP	Publik	DISDIKBUD	Tahunan	
16.	Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SD Indeks	Publik	DISDIKBUD	Tahunan	
17.	Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SMP Indeks	Publik	DISDIKBUD	Tahunan	

18.	Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SD Indeks	Publik	DISDIKBUD	Tahunan	
19.	Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SMP Indeks	Publik	DISDIKBUD	Tahunan	
20.	Persentase Ruang Kelas dalam Kondisi Baik	Publik	DISDIKBUD	Tahunan	
21.	Rata-Rata Lama Sekolah	Publik	DISDIKBUD	Tahunan	
22.	Harapan Lama Sekolah	Publik	DISDIKBUD	Tahunan	
23.	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	Publik	DISDIKBUD	Tahunan	
24.	Jumlah Kematian Ibu Per 100.000 KH (AKI / Angka Kematian Ibu)	Publik	DINKES	Tahunan	
25.	Prevalensi Stunting (Pendek Dan Sangat Pendek) Pada Balita	Publik	DINKES	Tahunan	
26.	Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Publik	DINKES	Tahunan	
27.	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten yang terakreditasi	Publik	DINKES	Tahunan	
28.	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	Publik	DINKES	Tahunan	
29.	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	Publik	DINKES	Tahunan	
30.	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	Publik	DINKES	Tahunan	
31.	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Publik	DINKES	Tahunan	
32.	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	Publik	DINKES	Tahunan	
33.	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	Publik	DINKES	Tahunan	
34.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Publik	DINKES	Tahunan	
35.	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	Publik	DINKES	Tahunan	
36.	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	Publik	DINKES	Tahunan	
37.	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	Publik	DINKES	Tahunan	
38.	Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	Publik	DINKES	Tahunan	
39.	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	Publik	DINKES	Tahunan	
40.	Usia Harapan Hidup	Publik	DINKES	Tahunan	
41.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Publik	DINKES	Tahunan	

42.	Angka Kematian Bayi	Publik	DINKES	Tahunan	
43.	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	Publik	DINKES	Tahunan	
44.	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	Publik	DINKES	Tahunan	
45.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	Publik	DINKES	Tahunan	
46.	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	Publik	DINKES	Tahunan	
47.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	Publik	DINKES	Tahunan	
48.	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	Publik	DINKES	Tahunan	
49.	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun	Publik	DINKES	Tahunan	
50.	Persentase Kabupaten yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi	Publik	DINKES	Tahunan	
51.	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran Hidup	Publik	DINKES	Tahunan	
52.	Jumlah Kabupaten yang Mencapai eliminasi malaria	Publik	DINKES	Tahunan	
53.	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun	Publik	DINKES	Tahunan	
54.	Angka Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	Publik	DINKES	Tahunan	
55.	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)	Publik	DINKES	Tahunan	
56.	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir kewenangan Kab/kota	Publik	PUPR	Tahunan	
57.	Persentase peningkatan perlindungan Kawasan dari abrasi dan banjir rob kewenangan Kabupaten	Publik	PUPR	Tahunan	
58.	Persentase Luas layanan irigasi multikomoditas kewenangan kab/kota	Publik	PUPR	Tahunan	
59.	Persentase Kondisi irigasi kewenangan kab/kota	Publik	PUPR	Tahunan	
60.	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di Kabupaten	Publik	PUPR	Tahunan	

61.	Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	Publik	PUPR	Tahunan	
62.	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten	Publik	PUPR	Tahunan	
63.	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	Publik	PUPR	Tahunan	
64.	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah Kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/ analis	Publik	PUPR	Tahunan	
65.	Persentase Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Publik	PUPR	Tahunan	
66.	Jumlah hari layanan penerbitan KKPR berusaha/non berusaha (sesuai kewenangan) yang terbit/dilayani Pemerintah Daerah	Publik	PUPR	Tahunan	
67.	Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota	Publik	PUPR	Tahunan	
68.	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Publik	PUPR	Tahunan	
69.	Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestic	Publik	PUPR	Tahunan	
70.	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Terhadap Kondumsi Air Minum	Publik	PUPR	Tahunan	
71.	Persentase warga negara korban bencana Kabupaten yang memperoleh rumah layak huni	Publik	PERKIMTAN	Tahunan	
72.	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Publik	PERKIMTAN	Tahunan	
73.	Persentase Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	Publik	PERKIMTAN	Tahunan	
74.	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	Publik	PERKIMTAN	Tahunan	
75.	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	Publik	PERKIMTAN	Tahunan	
76.	Indikator lingkungan permukiman kumuh (rasio permukiman layak huni, dan rasio rumah layak huni)	Publik	PERKIMTAN	Tahunan	
77.	Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Publik	PERKIMTAN	Tahunan	

78.	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Publik	PERKIMTAN	Tahunan	
79.	Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal	Publik	PERKIMTAN	Tahunan	
80.	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP	Publik	SATPOLPP	Tahunan	
81.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Publik		Tahunan	
82.	Jumlah PPNS pada Satpol PP	Publik	SATPOLPP	Tahunan	
83.	Presentase SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan perkada serta Penyelenggaraan Tibumtranmas	Publik	SATPOLPP	Tahunan	
84.	Persentase Jumlah Sarana prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakan perda dan perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat	Publik	SATPOLPP	Tahunan	
85.	Persentase jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar	Publik	SATPOLPP	Tahunan	
86.	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Publik	BAKESBANGPOL	Tahunan	
87.	Persentase warga negara dan aparatur yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Publik	BAKESBANGPOL	Tahunan	
88.	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Publik	BAKESBANGPOL	Tahunan	
89.	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	Publik	BAKESBANGPOL	Tahunan	
90.	Persentase penanganan pra bencana	Publik	BAKESBANGPOL	Tahunan	
91.	Persentase penanganan pasca bencana	Publik	BAKESBANGPOL	Tahunan	
92.	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Publik	BAKESBANGPOL	Tahunan	
93.	Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan	Publik	BAKESBANGPOL	Tahunan	
94.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada kabupaten /kota	Publik	BAKESBANGPOL	Tahunan	
95.	Persentase penanganan dan pengendalian bahaya kebakaran	Publik	BPBD	Tahunan	
96.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Publik	BPBD	Tahunan	

97.	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Publik	DINSOS	Tahunan	
98.	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Publik	DINSOS	Tahunan	
99.	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Publik	DINSOS	Tahunan	
100.	Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Publik	DINSOS	Tahunan	
101.	Persentase sarana prasarana yang disediakan sesuai standar untuk pelayanan sosial di luar panti	Publik	DINSOS	Tahunan	
102.	Persentase Pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti sesuai standar	Publik	DINSOS	Tahunan	
103.	Persentase korban bencana alam, sosial dan non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Kabupaten	Publik	DINSOS	Tahunan	
104.	Persentase sarana prasarana bagi korban bencana Kabupaten yang disediakan sesuai standar	Publik	DINSOS	Tahunan	
105.	Persentase pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana Kabupaten pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	Publik	DINSOS	Tahunan	
106.	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Publik	DINSOS	Tahunan	
107.	Persentase Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) perorangan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	Publik	DINSOS	Tahunan	
108.	Pesentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Publik	DINSOS	Tahunan	
109.	Pesentase Penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	Publik	DINSOS	Tahunan	
110.	Jumlah pemutahiran data fakir miskin dan kelompok rentan yang dilakukan selama satu tahun	Publik	DINSOS	Tahunan	

111.	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan. (Persentase penduduk miskin yang tercover PBI)	Publik	DINSOS	Tahunan	
112.	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan	Publik	DINSOS	Tahunan	
113.	Data Penerima layanan SPM Standart Pelayanan Minimum (SPM) dalam Orang	Publik	DINSOS	Tahunan	
114.	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	Publik	DINSOS	Tahunan	
115.	Persentase PPKS yang tertangani	Publik	DINSOS	Tahunan	
116.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Publik	DINSOS	Tahunan	
117.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Publik	DINSOS	Tahunan	
118.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Publik	DINSOS	Tahunan	
119.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Publik	DINSOS	Tahunan	
120.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana	Publik	DINSOS	Tahunan	
121.	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Publik	DISNAKERTRAN	Tahunan	
122.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Publik	DISNAKERTRAN	Tahunan	
123.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Rp/ Tenaga Kerja	Publik	DISNAKERTRAN	Tahunan	
124.	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Publik	DISNAKERTRAN	Tahunan	
125.	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	Publik	DISNAKERTRAN	Tahunan	
126.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Publik	DISNAKERTRAN	Tahunan	
127.	Jumlah Angkatan Kerja (Orang)	Publik	DISNAKERTRAN	Tahunan	
128.	Jumlah Penduduk Bekerja (Orang)	Publik	DISNAKERTRAN	Tahunan	
129.	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Kasus)	Publik	DISNAKERTRAN	Tahunan	
130.	Pemutusan Hubungan Kerja (Kasus)	Publik	DISNAKERTRAN	Tahunan	
131.	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Publik	DISNAKERTRAN	Tahunan	

132.	Indeks Pembangunan Keluarga	Publik	DP3KDALDUKKB	Tahunan	
133.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Publik	DP3KDALDUKKB	Tahunan	
134.	Indeks pemberdayaan gender (IDG)	Publik	DP3KDALDUKKB	Tahunan	
135.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Publik	DP3KDALDUKKB	Tahunan	
136.	Persentase ARG Daerah	Publik	DP3KDALDUKKB	Tahunan	
137.	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang mendapatkan layanan komprehensif	Publik	DP3KDALDUKKB	Tahunan	
138.	Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang mendapatkan layanan komprehensif	Publik	DP3KDALDUKKB	Tahunan	
139.	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan,Termasuk TPPO (Per 100.000 Penduduk Perempuan)	Publik	DP3KDALDUKKB	Tahunan	
140.	Ketersediaan Data Terpilah Gender dan Anak	Publik	DP3KDALDUKKB	Tahunan	
141.	Indek Perlindungan Anak (IPA)	Publik	DP3KDALDUKKB	Tahunan	
142.	Nilai Dalam kabupaten / Kota Layak Anak (KLA)	Publik	DP3KDALDUKKB	Tahunan	
143.	Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA)	Publik	DP3KDALDUKKB	Tahunan	
144.	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki laki dan anak perempuan.(Jumlah kasus kekerasan anak)	Publik	DP3KDALDUKKB	Tahunan	
145.	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Publik	DP3KDALDUKKB	Tahunan	
146.	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	Publik	DP3KDALDUKKB	Tahunan	
147.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Publik	DP3KDALDUKKB	Tahunan	
148.	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahu	Publik	DP3KDALDUKKB	Tahunan	
149.	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Publik	DP3KDALDUKKB	Tahunan	
150.	Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi Menurut Alat / Cara KB Modern (Demand Satisfied) (mCPRi)	Publik	DP3KDALDUKKB	Tahunan	
151.	IPBK	Publik	DP3KDALDUKKB	Tahunan	
152.	Indeks Lansia Berdaya	Publik	DP3KDALDUKKB	Tahunan	
153.	Indeks Pengasuhan Remaja Indeks	Publik	DP3KDALDUKKB	Tahunan	
154.	Proporsi Kampung KB Mandiri	Publik	DP3KDALDUKKB	Tahunan	
155.	KTD (Kehamilan Tidak Di Inginkan)	Publik	DP3KDALDUKKB	Tahunan	
156.	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten	Publik	DISHANPANG	Tahunan	

157.	Skor PPH (0-100)	Publik	DISHANPANG	Tahunan	
158.	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Publik	DISHANPANG	Tahunan	
159.	Persentase Pangan Segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	Publik	DISHANPANG	Tahunan	
160.	Indikator Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan atau Prevalence of Undernourishment (PoU)	Publik	DISHANPANG	Tahunan	
161.	Indeks Ketahanan Pangan	Publik	DISHANPANG	Tahunan	
162.	Angka Ketersediaan Pangan	Publik	DISHANPANG	Tahunan	
163.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten	Publik	DLH	Tahunan	
164.	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Publik	DLH	Tahunan	
165.	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah Kabupaten	Publik	DLH	Tahunan	
166.	indeks Capaian Pelayanan Persampahan (Km2)	Publik	DLH	Tahunan	
167.	Indeks Kualitas Air	Publik	DLH	Tahunan	
168.	Indeks Kualitas Udara	Publik	DLH	Tahunan	
169.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Publik		Tahunan	
170.	Persampahan (pengelolaan sampah dan pengurangan sampah melalui 3R (reduce, reuse, recycle)	Publik	DLH	Tahunan	
171.	Pengelola air limbah permukiman dan industry	Publik	DLH	Tahunan	
172.	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	Publik	DLH	Tahunan	
173.	Kabupaten yang Ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Publik	DLH	Tahunan	
174.	Persentase Penyelesaian Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik	Publik	DISDUKCAPIL	Tahunan	
175.	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Publik	DISDUKCAPIL	Tahunan	
176.	Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Publik	DISDUKCAPIL	Tahunan	
177.	Persentase Akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Publik	DISDUKCAPIL	Tahunan	
178.	Persentase Akta kelahiran yang diterbitkan	Publik	DISDUKCAPIL	Tahunan	
179.	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Publik	DISDUKCAPIL	Tahunan	

180.	Jumlah Data Profil Kependudukan yang disusun	Publik	DISDUKCAPIL	Tahunan	
181.	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Publik	DISDUKCAPIL	Tahunan	
182.	Persentase Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Publik	DISDUKCAPIL	Tahunan	
183.	Piramida Penduduk	Publik	DISDUKCAPIL	Tahunan	
184.	Cakupan Layanan Kependudukan	Publik	DISDUKCAPIL	Tahunan	
185.	Cakupan Penerbitan KTP di Kabupaten Murung Raya	Publik	DISDUKCAPIL	Tahunan	
186.	Rasio Penduduk Ber-KTP	Publik	DISDUKCAPIL	Tahunan	
187.	Persentase peningkatan status desa mandiri	Publik	DPMD	Tahunan	
188.	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	Publik	DPMD	Tahunan	
189.	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	Publik	DPMD	Tahunan	
190.	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Publik	DPMD	Tahunan	
191.	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	Publik	DPMD	Tahunan	
192.	Capaian Indeks Desa Membangun (IDM)	Publik	DPMD	Tahunan	
193.	Jumlah Desa Mandiri	Publik	DPMD	Tahunan	
94.	Rasio Konektivitas	Publik	DISHUB	Tahunan	
195.	Persentase kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan Kabupaten	Publik	DISHUB	Tahunan	
196.	Persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	Publik	DISHUB	Tahunan	
197.	Rata-rata V/C Rasio (rasio antara volume lalu lintas (V) dengan kapasitas jalan (C)).	Publik	DISHUB	Tahunan	
198.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Publik	DISHUB	Tahunan	
199.	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	Publik	DISHUB	Tahunan	
200.	transportasi Sungai	Publik	DISHUB	Tahunan	
201.	Angkutan Barang dan Orang	Publik	DISHUB	Tahunan	
202.	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Publik	DISKOMINFO	Tahunan	
203.	Persentase Perangkat Dearah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	Publik	DISKOMINFO	Tahunan	

204.	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	Publik	DISKOMINFO	Tahunan	
205.	Persentase layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Publik	DISKOMINFO	Tahunan	
206.	Indeks SPBE	Publik	DISKOMINFO	Tahunan	
207.	Jumlah surat kabar nasional/lokal	Publik	DISKOMINFO	Tahunan	
208.	Jumlah penyiaran radio lokal/nasional	Publik	DISKOMINFO	Tahunan	
209.	Web site milik pemerintah daerah (buah)	Publik	DISKOMINFO	Tahunan	
210.	Cakupan Layanan Telekomunikasi (blankspot)	Publik	DISKOMINFO	Tahunan	
211.	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband	Publik	DISKOMINFO	Tahunan	
212.	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Publik	DISKOMINFO	Tahunan	
213.	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Publik	DISKOMINFO	Tahunan	
214.	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Publik	DISKOMINFO	Tahunan	
215.	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Publik	DISKOMINFO	Tahunan	
216.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Publik	DISKOMINFO	Tahunan	
217.	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Publik	DISPERINDAGK OP & UKM	Tahunan	
218.	Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Publik	DISPERINDAGK OP & UKM	Tahunan	
219.	Pertumbuhan Wirausaha	Publik	DISPERINDAGK OP & UKM	Tahunan	
220.	Jumlah Wirausahawan Muda	Publik	DISPERINDAGK OP & UKM	Tahunan	
221.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Publik	DISPERINDAGK OP & UKM	Tahunan	
222.	Proses perizinan melalui OSS (Online Single Submission)	Publik	DISPERINDAGK OP & UKM	Tahunan	
223.	Produk usaha yang belum tersertifikasi	Publik	DISPERINDAGK OP & UKM	Tahunan	
224.	Persentase koperasi aktif (%)	Publik	DISPERINDAGK OP & UKM	Tahunan	
225.	Jumlah Wirausaha Baru (Orang)	Publik	DISPERINDAGK OP & UKM	Tahunan	
226.	Jumlah Usaha Mikro (Jumlah)	Publik	DISPERINDAGK OP & UKM	Tahunan	
227.	Nilai Total Penjualan Perdagangan Antar Wilayah pada kab/kota	Publik	DISPERINDAGK OP & UKM	Tahunan	

228.	Persentase alat ukur takaran timbangan dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Publik	DISPERINDAGK OP & UKM	Tahunan	
229.	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten	Publik	DISPERINDAGK OP & UKM	Tahunan	
230.	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten	Publik	DISPERINDAGK OP & UKM	Tahunan	
231.	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten	Publik	DISPERINDAGK OP & UKM	Tahunan	
232.	Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten	Publik	DISPERINDAGK OP & UKM	Tahunan	
233.	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten	Publik	DISPERINDAGK OP & UKM	Tahunan	
234.	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	Publik	DISPERINDAGK OP & UKM	Tahunan	
235.	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan dibandingkan dengan jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah dilakukan pengawasan	Publik	DISPERINDAGK OP & UKM	Tahunan	
236.	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang memiliki tingkat kepatuhan minimal 'Baik' dibandingkan seluruh jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang sudah dilakukan pembinaan	Publik	DISPERINDAGK OP & UKM	Tahunan	
237.	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini	Publik	DISPERINDAGK OP & UKM	Tahunan	
238.	Distribusi PDRB Industri Pengolahan	Publik	DISPERINDAGK OP & UKM	Tahunan	
239.	Distribusi PDRB Akomodasi Makan dan Minum	Publik	DISPERINDAGK OP & UKM	Tahunan	
240.	PDRB Sektor Perdagangan	Publik	DISPERINDAGK OP & UKM	Tahunan	
241.	PDRB Sektor Perindustrian	Publik	DISPERINDAGK OP & UKM	Tahunan	
242.	Jumlah Industri Kecil	Publik	DISPERINDAGK OP & UKM	Tahunan	
243.	Pertumbuhan Ekonomi	Publik	DISPERINDAGK OP & UKM	Tahunan	
244.	Analisis Tipologi Klassen PDRB	Publik	DISPERINDAGK OP & UKM	Tahunan	
245.	Klasifikasi Sektor PDRB Berdasarkan Kontribusi dan Pertumbuhannya	Publik	DISPERINDAGK OP & UKM	Tahunan	

246.	PDRB Per Kapita Kabupaten Murung Raya	Publik	DISPERINDAGK OP & UKM	Tahunan	
247.	Penanaman Modal Dalam Negri	Publik	DPMPTSP	Tahunan	
248.	PMA	Publik	DPMPTSP	Tahunan	
249.	Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB	Publik	DPMPTSP	Tahunan	
250.	Persentase peningkatan investasi di kabupaten	Publik	DPMPTSP	Tahunan	
251.	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Publik	DPMPTSP	Tahunan	
252.	Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat	Publik	DKOP Pariwisata	Tahunan	
253.	Persentase Atlet yang berasal dari kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi	Publik	DKOP Pariwisata	Tahunan	
254.	Jumlah organisasi pemuda (Organisasi)	Publik	DKOP Pariwisata	Tahunan	
255.	Jumlah organisasi olahraga (Organisasi)	Publik	DKOP Pariwisata	Tahunan	
256.	Jumlah kegiatan kepemudaan (Kegiatan)	Publik	DKOP Pariwisata	Tahunan	
257.	Jumlah Cabor yang Memperoleh Medali (Unit)	Publik	DKOP Pariwisata	Tahunan	
258.	Jumlah Wirausaha Muda (Orang)	Publik	DKOP Pariwisata	Tahunan	
259.	Persentase Jumlah Warisan Budaya yang dilestarikan (Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya)	Publik	DISDIKBUD	Tahunan	
260.	Persentase Jumlah Cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang didaftarkan	Publik	DISDIKBUD	Tahunan	
261.	Persentase Jumlah Tenaga Kebudayaan yang memperoleh sertifikasi profesi dibidang kebudayaan	Publik	DISDIKBUD	Tahunan	
262.	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Publik	DISDIKBUD	Tahunan	
263.	Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	Publik	DISDIKBUD	Tahunan	
264.	Jumlah Grup Kesenian/ Sanggar Seni	Publik	DISDIKBUD	Tahunan	
265.	Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	Publik	DKOP Pariwisata	Tahunan	
266.	Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang non Bintang)	Publik	DKOP Pariwisata	Tahunan	
267.	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	Publik	DKOP Pariwisata		
268.	Jumlah kunjungan wisatawan	Publik	DKOP Pariwisata	Tahunan	
269.	PAD sektor pariwisata	Publik	DKOP Pariwisata	Tahunan	
270.	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Publik	DISARPUS	Tahunan	
271.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Publik	DISARPUS	Tahunan	

272.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (Orang)	Publik	DISARPUS	Tahunan	
273.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (Jumlah Judul)	Publik	DISARPUS	Tahunan	
274.	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup Pemerintahan Daerah	Publik	DISARPUS	Tahunan	
275.	Jumlah arsip yang dikelola	Publik	DISARPUS	Tahunan	
276.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/Desa/kelurahan telah menerapkan sistem pengelolaan arsip secara baku	Publik	DISARPUS	Tahunan	
277.	Peningkatan produksi Perikanan Tangkap	Publik	DISARPUS	Tahunan	
278.	Peningkatan produksi Perikanan Budidaya	Publik	DISTANIK	Tahunan	
279.	Produk Olahan Hasil Perikanan	Publik	DISTANIK	Tahunan	
280.	Tingkat Konsumsi Ikan	Publik	DISTANIK	Tahunan	
281.	Peningkatan produksi tanaman pangan	Publik	DISTANIK	Tahunan	
282.	Peningkatan produksi hortikultura	Publik	DISTANIK	Tahunan	
283.	Peningkatan produksi komoditas peternakan	Publik	DISTANIK	Tahunan	
284.	Peningkatan produksi komoditas perkebunan	Publik	DISTANIK	Tahunan	
285.	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 PHMS)	Publik	DISTANIK	Tahunan	
286.	Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Publik	DISTANIK	Tahunan	
287.	Produksi Pertanian (ton)	Publik	DISTANIK	Tahunan	
288.	Produktivitas Sektor Pertanian (Ha/Kw)	Publik	DISTANIK	Tahunan	
289.	Luas Areal Tanaman Perkebunan (Kelapa Sawit, Kelapa, Karet, Kopi, Kakao)	Publik	DISTANIK	Tahunan	
290.	Produksi, Kesehatan hewan, Peredaran dan Perdagangan Ternak, hingga Pengolahan Hasil Peternakan	Publik	DISTANIK	Tahunan	
291.	Produksi Daging (ton)	Publik	DISTANIK	Tahunan	
292.	Produksi Telur (ton)	Publik	DISTANIK	Tahunan	
293.	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	Publik	BKAD	Tahunan	
294.	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD	Publik	BKAD	Tahunan	
295.	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Publik	BKAD	Tahunan	
296.	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan	Publik	BKAD	Tahunan	
297.	Wajib Pelayanan Dasar	Publik	BKAD	Tahunan	

298.	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Publik	BKAD	Tahunan	
299.	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Publik	BKAD	Tahunan	
300.	Persentase Penurunan SILPA	Publik	BKAD	Tahunan	
301.	Rasio Likuiditas	Publik	BKAD	Tahunan	
302.	Rasio Solvabilitas	Publik	BKAD	Tahunan	
303.	Rata Proporsi Komponen Pendapatan Daerah	Publik	BKAD	Tahunan	
304.	Rasio Kemandirian Daerah	Publik	BKAD	Tahunan	
305.	Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal	Publik	BKAD	Tahunan	
306.	Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah	Publik	BKAD	Tahunan	
307.	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	Publik	BKAD	Tahunan	
308.	Rasio Efektivitas	Publik	BKAD	Tahunan	
309.	Rasio PAD Terhadap PDRB	Publik	BKAD	Tahunan	
310.	Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja	Publik	BKAD	Tahunan	
311.	Proporsi Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja	Publik	BKAD	Tahunan	
312.	Proporsi Belanja Modal Terhadap Dana Transfer Umum	Publik	BKAD	Tahunan	
313.	Realisasi Pendapatan Dearah	Publik	BKAD	Tahunan	
314.	Perkembangan Realisasi Belanja Dearah	Publik	BKAD	Tahunan	
315.	Perkembangan Realisasi Pembiayaan Dearah	Publik	BKAD	Tahunan	
316.	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Publik	SETDA	Tahunan	
317.	Indeks Reformasi Birokrasi	Publik	SETDA	Tahunan	
318.	Nilai SAKIP	Publik	SETDA	Tahunan	
319.	Persentase Kematangan OPD	Publik	SETDA	Tahunan	
320.	Indeks Pelayanan Publik	Publik	SETDA	Tahunan	
321.	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yg telah ditetapkan dengan PERKADA (Dokumen)	Publik	BKAD	Tahunan	
322.	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perubahan RKPD yg telah ditetapkan dengan PERKADA (Dokumen)	Publik	BKAD	Tahunan	
323.	Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD (Dokumen)	Publik	BKAD	Tahunan	
324.	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Publik	BKAD	Tahunan	
325.	Rata-rata pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	Publik	BKAD	Tahunan	
326.	Perkembangan Realisasi Pendapatan Dearah Kabupaten Murung Raya (PKAD)	Publik	BKAD	Tahunan	
327.	Pertumbuhan dan Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah	Publik	BKAD	Tahunan	
328.	(PENDAPATAN ,Pendapatan Asli Daerah ,Pendapatan Transfer ,Transfer Pemerintah Pusat ,Transfer Antar-Daerah ,Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah)	Publik	BKAD	Tahunan	

329.	Realisasi dan Rata-Rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah (PKAD)	Publik	BKAD	Tahunan	
330.	Indeks Gini	Publik	BKAD	Tahunan	
331.	Angka Kemiskinan	Publik	BKAD	Tahunan	
332.	Indeks Pembangunan Manusia	Publik	BKAD	Tahunan	
333.	Angka Ketergantungan	Publik	BKAD	Tahunan	
334.	Indeks Daya Saing Daerah	Publik	BKAD	Tahunan	
335.	Nilai Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN	Publik	BKPSDM	Tahunan	
336.	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah	Publik	BKPSDM	Tahunan	
337.	Persentase ASN yang mengikuti Diklat Formal	Publik	BKPSDM	Tahunan	
338.	Persentase ASN dengan SKP Baik	Publik	BKPSDM	Tahunan	
339.	Indeks Profesionalitas ASN	Publik	BKPSDM	Tahunan	
340.	Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir) WTP	Publik	Inspektorat	Tahunan	
341.	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Publik	Inspektorat	Tahunan	
342.	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Publik	Inspektorat	Tahunan	
343.	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Publik	Inspektorat	Tahunan	
344.	Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK	Publik	Inspektorat	Tahunan	
345.	Nilai Capaian MCP (MCP adalah dashboard monitoring pencegahan korupsi yang dikembangkan oleh KPK untuk mengukur efektivitas upaya pencegahan korupsi di pemerintah daerah)	Publik	Inspektorat	Tahunan	
346.	Level Kapabilitas APIP ((Internal Audit Capability Model/IA-CM) Digunakan untuk mengukur kemampuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sesuai Peraturan BPKP)	Publik	Inspektorat	Tahunan	
347.	Maturitas SPIP ((Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)	Publik	Inspektorat	Tahunan	
348.	Persentase Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Publik	Hubungan dengan Perwakilan Daerah	Tahunan	
349.	Persentase Penetapan RanPerda Tahun N	Publik	Hubungan dengan Perwakilan Daerah	Tahunan	
350.	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N	Publik	Pelayanan Publik	Tahunan	
351.	Pajak daerah	Publik	Dispenda	Tahunan	
352.	Retribusi daerah	Publik	Dispenda	Tahunan	

353.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	Publik	Dispenda	Tahunan	
354.	Lain-lain PAD yang sah	Publik	Dispenda	Tahunan	
355.	Pendapatan Transfer	Publik	Dispenda	Tahunan	
356.	Transfer Pemerintah	Publik	Dispenda	Tahunan	
357.	Dana Perimbangan	Publik	Dispenda	Tahunan	
358.	Dana Bagi Hasil	Publik	Dispenda	Tahunan	
359.	Dana Alokasi Umum	Publik	Dispenda	Tahunan	
360.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	Publik	Dispenda	Tahunan	
361.	Dana Insentif Daerah	Publik	Dispenda	Tahunan	
362.	Dana Otonomi Khusus	Publik	Dispenda	Tahunan	
363.	Dana Keistimewaan	Publik	Dispenda	Tahunan	
364.	Dana Desa	Publik	Dispenda	Tahunan	
365.	Transfer Antar-Daerah	Publik	Dispenda	Tahunan	
366.	Pendapatan Bagi Hasil	Publik	Dispenda	Tahunan	
367.	Bantuan Keuangan	Publik	Dispenda	Tahunan	
368.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Publik	Dispenda	Tahunan	
369.	Hibah	Publik	Dispenda	Tahunan	
370.	Dana Darurat	Publik	Dispenda	Tahunan	
371.	lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan	Publik	Dispenda	Tahunan	
372.	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB (PDRB ADHB)	Publik	Dispenda	Tahunan	
373.	Kurangnya kepatuhan wajib pajak dan retribusi dalam membayar pajak	Publik	Dispenda	Tahunan	
374.	Terdapat perubahan Peraturan Daerah yang mengatur besaran tarif pajak dan retribusi daerah	Publik	Dispenda	Tahunan	
375.	serta peraturan yang mengatur kewenangan dalam kebijakan pajak dan retribusi	Publik	Dispenda	Tahunan	
376.	Jumlah penerima bantuan skripsi wisuda	Publik	SETDA KESRA	Tahunan	
377.	Jumlah penerima beasiswa kartu mura hebat (s1) reguler dan non reguler	Publik	SETDA KESRA	Tahunan	
378.	Jumlah Peta Potensi Investasi	Publik	DPMPSP	Tahunan	
379.	Jumlah MoU Kerjasama yang Terjalin dengan Pihak Swasata	Publik	DPMPSP	Tahunan	
380.	Indeks Kepuasan Pelayanan Penanaman Modal	Publik	DPMPSP	Tahunan	
381.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Persentase Penyelesaian Perizinan Tepat Waktu Program Pelayanan Penanaman Modal	Publik	DPMPSP	Tahunan	
382.	Persentase peningkatan investasi di kabupaten	Publik	DPMPSP	Tahunan	
383.	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Publik	DPMPSP	Tahunan	
384.	Penyerapan aspirasi masyarakat (reses)	Publik	SETWAN	Tahunan	
385.	Jumlah anggota DPR menurut Parpol dan Jenis Kelamin	Publik	SETWAN	Tahunan	
386.	Raperda yang menjadi Perda	Publik	SETWAN	Tahunan	
387.	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	Publik	BAPERIDA	Tahunan	

388.	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah	Publik	BAPERIDA	Tahunan	
389.	Indeks Perencanaan Pembangunan (IPPD) baru tahun ini berjalan relese tahun depan	Publik	BAPERIDA	Tahunan	
390.	Nilai Komponen Perencanaan dalam SAKIP	Publik	BAPERIDA	Tahunan	
391.	Nilai Komponen Pengukuran dalam SAKIP	Publik	BAPERIDA	Tahunan	



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Murung Raya,

RHONI KLAWA TUMON, S.H., M.H.



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

HERIYUS